

DAMPAK PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDANAAN REDD+ DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Regita Cahya Gracia Rerung¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan yang berpotensi memengaruhi komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon dan keberlanjutan program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pembangunan IKN terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait perubahan penggunaan lahan, peningkatan emisi karbon, dan implikasinya terhadap mekanisme pendanaan berbasis hasil. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari laporan resmi, kebijakan pemerintah, serta dokumen lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN menyebabkan konversi kawasan hutan produksi dan sebagian kawasan lindung menjadi area infrastruktur, sehingga menurunkan kapasitas serapan karbon sekitar 188.200 ton CO₂ per tahun dan berpotensi mengurangi pencapaian target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia. Kondisi ini berdampak pada menurunnya nilai insentif dari donor internasional seperti Norwegia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan pendanaan REDD+ bergantung pada mitigasi melalui restorasi hutan, tata kelola lingkungan yang baik, serta integrasi kebijakan rendah karbon dalam pembangunan IKN untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Ibu Kota Negara (IKN), REDD+, pendanaan berbasis hasil, deforestasi, pembangunan berkelanjutan, Kalimantan Timur.

Abstract

The development of Indonesia's new capital city (IKN) in East Kalimantan has led to significant forest cover changes that potentially affect the country's commitment to reducing carbon emissions and the sustainability of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program. This study aims to analyze the impact of IKN development on the sustainability of REDD+ funding in East Kalimantan, focusing on land-use change, increased carbon emissions, and implications for results-based payment mechanisms. The research employs a qualitative descriptive method using primary data from interviews and secondary data from official reports, government policies, and environmental documents. The findings reveal that IKN development has converted areas of limited and permanent production forests and parts of protected zones into infrastructure areas, reducing carbon absorption capacity by approximately 188,200 tons of CO₂ per year and potentially hindering Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) targets. This situation may decrease incentive payments from international donors such as Norway. The study concludes that the sustainability of REDD+ funding depends on mitigation efforts through forest restoration, good environmental governance, and the integration of low-carbon policies in IKN development to maintain Indonesia's international credibility and balance development with environmental conservation.

Keywords: National Capital City (IKN), REDD+, results-based funding, deforestation, sustainable development, East Kalimantan

PENDAHULUAN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi langkah besar pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan transformasi ekonomi nasional. Proyek strategis ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta menjadi simbol kemajuan dan transformasi nasional yang modern, hijau, dan berkelanjutan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah tantangan nyata yang perlu diperhatikan secara serius. Salah satu tantangan utama adalah konflik tata ruang antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar dan eksistensi kawasan hutan yang memiliki fungsi ekologis penting dalam pengendalian perubahan iklim. Kalimantan Timur yang menjadi lokasi pembangunan IKN merupakan provinsi dengan tutupan hutan mencapai $\pm 8,4$ juta hektar dan berperan penting sebagai wilayah percontohan implementasi program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) di Indonesia.

Program REDD+ merupakan salah satu mekanisme internasional di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan. Dalam skema ini memberikan insentif finansial kepada negara berkembang yang berhasil menurunkan tingkat kehilangan hutan dan emisi karbon melalui mekanisme pembayaran berbasis hasil (Result-Based Payment). Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerima pembayaran berbasis hasil dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang dikelola oleh Bank Dunia, dengan total mencapai sekitar USD 110 juta atas pengurangan lebih dari 30 juta ton CO₂ pada periode 2019–2020. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendanaan REDD+ memberikan kontribusi nyata terhadap upaya konservasi hutan dan penguatan ekonomi hijau di tingkat daerah, sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam diplomasi lingkungan internasional. Namun, pembangunan IKN di wilayah yang sebelumnya didominasi kawasan berhutan menimbulkan potensi dampak terhadap keberlanjutan program dan

pendanaan REDD+. Aktivitas konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur, permukiman, serta fasilitas pemerintahan berpotensi meningkatkan laju deforestasi dan menurunkan kapasitas penyerapan karbon.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kawasan pembangunan IKN mencakup berbagai fungsi hutan seperti hutan produksi terbatas, dan sebagian kawasan lindung yang kini beralih fungsi menjadi area penggunaan lain (APL). Forest Watch Indonesia (2023) mencatat bahwa selama periode 2018–2021 terjadi deforestasi sekitar 18.000 hektar di kawasan IKN, dan bertambah ± 1.663 hektar hingga pertengahan 2023. Kondisi ini mengurangi potensi serapan karbon sebesar ± 188.200 ton CO₂ per tahun dan dapat menghambat pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, sekaligus menurunkan potensi pendanaan berbasis hasil dari mitra internasional seperti Norwegia.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana pembangunan IKN berdampak terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+ di Kalimantan Timur. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan prinsip perlindungan hutan dapat menyebabkan peningkatan emisi dan menurunkan kinerja pencapaian pengurangan emisi nasional, yang berimplikasi pada berkurangnya potensi pembayaran berbasis hasil dari mitra internasional. Sebaliknya, apabila pembangunan IKN benar-benar menerapkan konsep forest city dan kebijakan rendah karbon secara konsisten, maka keberlanjutan pendanaan REDD+ dapat tetap terjaga dan bahkan menjadi model sinergi antara pembangunan dan konservasi lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Ibu Kota Negara terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+ di Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pembangunan nasional dan mekanisme pendanaan iklim internasional, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Good Environmental Governance (GEG) dan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai landasan analisis. Dimana Teori Good Environmental Governance pertama kali berkembang pada awal 2000-an melalui pemikiran Jan Kooiman (2003) dan Frank Biermann (2007), yang menekankan pentingnya tata kelola lingkungan yang baik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Teori ini lahir dari gagasan good governance yang kemudian diterapkan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dalam mengelola lingkungan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan. GEG banyak digunakan dalam kajian kebijakan publik dan lingkungan global, termasuk dalam kerangka United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Environment Programme (UNEP), untuk menilai sejauh mana tata kelola lingkungan di suatu negara memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Prinsip-prinsip utama teori ini mencakup:

- 1) Transparansi, yaitu adanya keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan
- 2) Akuntabilitas, yaitu tanggung jawab pemerintah dan pelaku kebijakan terhadap hasil pengelolaan lingkungan
- 3) partisipasi, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 4) keadilan, yang memastikan manfaat pembangunan dinikmati secara merata tanpa merusak ekosistem.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi kunci dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+. sedangkan, Konsep pembangunan berkelanjutan berasal dari laporan World Commission on Environment and Development (WCED) tahun 1987 yang dikenal sebagai Brundtland Report. Konsep ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Konsep ini menekankan tiga dimensi utama

yang harus seimbang, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan IKN, konsep ini menuntut agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tidak dilakukan dengan mengorbankan kelestarian hutan dan daya dukung ekosistem Kalimantan Timur.

Kedua hal ini saling melengkapi, Good Environmental Governance memberikan dasar tata kelola yang memastikan kebijakan pembangunan dilakukan secara bertanggung jawab dan partisipatif, sedangkan pembangunan berkelanjutan menegaskan arah tujuan pembangunan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, keduanya menjadi alat analisis penting dalam menilai sejauh mana kebijakan pembangunan IKN mendukung keberlanjutan pendanaan REDD+ dan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon global.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif kualitatif untuk menjelaskan dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yang diperoleh dari sumber-sumber relevan, seperti laporan pemerintah, publikasi KLHK, Forest Watch Indonesia, World Bank, dan literatur ilmiah terkait REDD+, pembangunan IKN, dan tata kelola lingkungan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan data yang ada, kemudian menghubungkan informasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang utuh sesuai topik penelitian

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (KUKAR) , Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat 115°46'–117°1' BT dan 0°34'–1°11' LS, dengan luas wilayah ±256.142 hektare. Kawasan ini sebelumnya merupakan area hutan yang beragam, termasuk hutan lindung, hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi tetap, dan hutan sekunder, serta daerah penyangga ekologis seperti daerah aliran sungai (DAS).

Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan karena

beberapa faktor strategis, antara lain: masalah kepadatan penduduk, penurunan kualitas lingkungan, banjir, penurunan tanah (land subsidence), polusi udara, dan tekanan sosial-ekonomi tinggi di Jakarta. Pemerintah juga bertujuan mendorong pemerataan pembangunan nasional dan memanfaatkan Kalimantan Timur sebagai lokasi yang relatif aman dari bencana alam serta memiliki potensi ruang hijau dan sumber daya alam yang melimpah.

Namun ditengah rencana dan pembangunan Ibu kota Negara di Kalimantan Timur, memberikan dampak terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan timur, dimana Kalimantan timur ini merupakan salah satu provinsi percontohan untuk REDD+. Hal ini dapat menambah jumlah tutupan hutan untuk dialihfungsikan menjadi pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lainnya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (SIPHPL) dan Badan Pengelola Keuangan Hutan (BPKH) menunjukkan penurunan tutupan lahan yang dimana sebelum dimulainya proyek IKN pada tahun 2022, Kalimantan Timur memiliki $\pm 8,3$ juta ha hutan. Namun sejak pembangunan IKN, terjadi deforestasi ± 1.920 ha dan pembukaan lahan tambahan ± 16.900 ha, sehingga total luas hutan yang berkurang mencapai ± 18.820 ha. Dampak pengurangan ini tidak hanya berupa kehilangan luas hutan saja tetapi juga pada fungsi hutan dalam menyerap karbon sebanyak $\pm 3,76$ juta ton CO₂ dan memproduksi oksigen ± 188.000 ton/tahun, serta berdampak juga pada hilangnya habitat satwa endemik seperti, orangutan dan bekantan, degradasi ekosistem, serta peningkatan emisi karbon yang menjadi tantangan terhadap komitmen REDD+ Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim. Dalam hal ini juga pembangunan IKN juga memberikan dampak terhadap beberapa aspek seperti, Lingkungan, Sosial, dan juga Ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendanaan REDD+

Dampak Pembangunan IKN terhadap Keberlanjutan Pendanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Timur

a. Dampak terhadap Lingkungan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur menimbulkan dampak lingkungan signifikan melalui alih fungsi lahan yang masif, termasuk hutan sekunder, hutan produksi terbatas

(HPT), dan daerah penyangga ekologis seperti DAS. Kawasan ini berperan penting sebagai penyerap karbon, penghasil oksigen, dan penopang keanekaragaman hayati, yang menjadi bagian dari mitigasi perubahan iklim melalui skema REDD+, khususnya FCPF-CF di Kalimantan Timur.

Hingga pertengahan 2023, deforestasi di wilayah IKN tercatat seluas 18.820 ha. Dengan asumsi serapan karbon rata-rata ± 10 ton CO₂/ha/tahun, hilangnya hutan ini menurunkan kapasitas penyerapan karbon sekitar 188.200 ton CO₂ per tahun, dari sebelumnya 50 juta ton CO₂e menjadi 44 juta ton CO₂e, atau kehilangan 6 juta ton CO₂e. Meski kontribusi negatif terhadap target nasional pengurangan emisi GRK 29% pada 2030 relatif kecil ($\pm 1,3\%$), alih fungsi hutan tetap memberikan tekanan nyata terhadap keberlanjutan program REDD+.

Selain target nasional, IKN menargetkan emisi karbon tahunan tidak melebihi 1,1 juta ton CO₂, sesuai Nusantara *Net Zero Strategy* 2045. Setiap perubahan penggunaan lahan di kawasan IKN berpotensi memengaruhi capaian pengurangan emisi, yang menjadi dasar mekanisme pendanaan REDD+ berbasis hasil (*Result-Based Payment*). Indonesia telah menerima kontribusi total USD 216 juta dari Norwegia untuk capaian pengurangan emisi tertentu, sehingga keberlanjutan pendanaan ini sangat bergantung pada kontrol alih fungsi lahan.

Dengan demikian, pembangunan IKN menurunkan kapasitas penyerapan karbon, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan menimbulkan risiko terhadap pendanaan REDD+. Penting untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjaga fungsi ekologis hutan sebagai penopang utama keseimbangan lingkungan hidup dan komitmen iklim Indonesia.

b. Dampak terhadap Sosial

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdampak signifikan terhadap aspek sosial masyarakat lokal, khususnya ± 20.000

jiwa masyarakat adat di Sepaku (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara, yang terbagi dalam 19 komunitas di PPU dan 2 komunitas di Kukar. Sebelum pembangunan, masyarakat menggantungkan hidup pada hutan, perikanan, dan sumber daya alam sekitar. Pembangunan IKN menyebabkan sebagian warga direlokasi, akses hutan dibatasi, dan sumber penghidupan berkurang. Berdasarkan AMAN, 20 komunitas terdampak langsung, sementara Yayasan Madani Berkelanjutan mencatat lebih dari 40.000 ha lahan masyarakat adat berisiko terdampak yang belum diakui melalui skema hutan adat. Pemerintah melalui Badan Tanah menyiapkan relokasi seluas 400 ha di Maridan, Gersik, dan Pantai Lango, serta 1.750 ha di Desa Jenebora, dengan tambahan 4.162 ha HPL untuk reforma agraria dan pemukiman warga terdampak. Proses ini sebagian besar masih dalam tahap perencanaan dan negosiasi. Kehilangan lahan berarti kehilangan identitas kultural, akses ekonomi, dan peran ekologis masyarakat sebagai penjaga hutan. Hal ini menimbulkan risiko konflik tenurial dan menurunkan keterlibatan masyarakat dalam skema community-based REDD+, yang meliputi patroli hutan, pemantauan degradasi, dan praktik berbasis kearifan lokal seperti tana' ulen. Dengan berkurangnya partisipasi masyarakat, risiko deforestasi meningkat, sehingga capaian pengurangan emisi di Provinsi Kalimantan Timur berpotensi menurun. Pendanaan REDD+ bersifat Result-Based Payment, seperti kontribusi Norwegia sebesar USD 216 juta melalui Lol (USD 56 juta untuk capaian 11,2 juta ton CO₂e pada 2016–2017, dan USD 60 juta pada 2019–2020). Jika deforestasi meningkat akibat berkurangnya peran masyarakat, keberlanjutan pembayaran REDD+ bisa terganggu. Dengan demikian, relokasi, konflik lahan, dan menurunnya partisipasi masyarakat berdampak langsung pada keberlanjutan REDD+, legitimasi sosial pembangunan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan sosial dan ekologi.

c. Dampak terhadap Ekonomi

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur

telah menyebabkan konversi signifikan lahan hutan untuk berbagai infrastruktur, termasuk jalan, perkantoran pemerintah, permukiman aparat sipil negara (ASN), dan fasilitas publik. Konversi ini berdampak langsung terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi basis mata pencaharian masyarakat lokal dan komunitas adat. Sebelum pembangunan IKN, masyarakat memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, seperti rotan untuk kerajinan anyaman, damar untuk kerajinan dan obat tradisional, kayu lokal untuk mebel dan bahan bangunan, serta buah-buahan hutan yang dijual segar atau diolah. Beberapa masyarakat juga memperoleh pendapatan dari jasa ekowisata berbasis hutan, seperti panduan wisata, homestay, dan trekking.

Pendapatan rata-rata masyarakat dari pemanfaatan sumber daya alam ini sebelum pembangunan IKN berkisar antara Rp5 juta per keluarga dalam setiap bulan. Namun, setelah sebagian besar lahan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, akses masyarakat terhadap sumber daya alam berkurang drastis. seperti, produksi rotan menurun karena lahan yang sebelumnya digunakan untuk memanen rotan kini telah menjadi perkantoran dan permukiman ASN, sehingga pendapatan dari kerajinan rotan turun kurang lebih dari Rp1,5-2 juta menjadi sekitar Rp0,50,8 juta per bulan per keluarga, pendapatan dari damar juga mengalami penurunan yang awal mulanya sekitaran Rp1-1,5 juta menjadi Rp0,3-0,5 juta, kayu lokal dari Rp1,5-2,5 juta menjadi Rp0,5-0,7 juta, dan buah-buahan hutan dari Rp0,5-0,8 juta menjadi Rp0-0,2 juta. Pendapatan dari jasa ekowisata bahkan mengalami penurunan drastis, dari Rp2-3 juta menjadi hanya Rp0-0,5 juta per bulan. Secara keseluruhan, masyarakat kehilangan sekitar Rp3 juta per bulan, yang menunjukkan dampak ekonomi signifikan akibat pembangunan IKN. Kehilangan pendapatan ini berdampak langsung pada keberlanjutan mekanisme REDD+, karena partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci untuk mencapai pengurangan emisi berbasis hasil (Result-Based Payment/RBP).

Tantangan dan faktor penghambat keberlanjutan pendanaan REDD+ terhadap pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan. Kawasan pembangunan mencakup hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi biasa, yang penting untuk menyerap karbon dan mendukung upaya REDD+. Alih fungsi lahan ini menurunkan kapasitas penyerapan karbon dan berisiko menghambat pencapaian target pengurangan emisi nasional, sekaligus menekan keberlanjutan pendanaan REDD+.

Pembangunan rendah karbon menjadi kunci, meliputi desain bangunan ramah lingkungan, transportasi publik listrik, dan konservasi kawasan hijau. Sistem tata kelola berbasis data melalui MRV harus diperluas agar dampak pembangunan terhadap tutupan hutan dan emisi dapat terpantau, sekaligus meminimalkan konflik antara pembangunan dan konservasi. Keterlibatan masyarakat lokal dan komunitas adat juga krusial, karena mereka berperan dalam pengelolaan hutan berbasis REDD+. Tanpa partisipasi ini, insentif ekonomi untuk menjaga hutan menurun, mengancam capaian pengurangan emisi dan aliran dana internasional. Skema kompensasi ekonomi melalui pengembangan keterampilan, insentif komunitas, serta usaha berkelanjutan berbasis rotan, damar, atau agroforestri menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan target emisi.

Dengan integrasi pembangunan rendah karbon, tata kelola lingkungan yang baik, partisipasi masyarakat, dan kompensasi ekonomi, IKN dapat menjadi kota masa depan yang ramah lingkungan, inklusif sosial, dan mendukung komitmen iklim nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur berdampak signifikan terhadap

keberlanjutan program REDD+. Konversi kawasan hutan menjadi infrastruktur, permukiman, dan kompleks pemerintahan telah mengurangi tutupan hutan ± 18.820 ha hingga pertengahan 2023, termasuk hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan sebagian hutan lindung. Penurunan ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas penyerapan karbon sekitar 188.200 ton CO₂ per tahun, sehingga menekan kontribusi Indonesia terhadap target pengurangan emisi nasional (NDC) dan meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan pendanaan REDD+ berbasis hasil (Result-Based Payment). Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menegaskan bahwa pembangunan IKN secara langsung memengaruhi implementasi dan efektivitas REDD+, khususnya melalui perubahan tutupan lahan dan potensi peningkatan emisi karbon. Temuan ini menunjukkan perlunya kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk penguatan tata kelola hutan, partisipasi masyarakat lokal, serta strategi mitigasi karbon, untuk memastikan REDD+ tetap efektif dan pembangunan IKN berjalan sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim.

REFERENSI.

- Amila, S., et al. (2023). Analisis dampak dan resiko pemindahan Ibu Kota Negara terhadap ekonomi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10, 10–18.
<https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1011>
- Angelsen, A., Martius, C., De Sy, V., Duchelle, A. E., Larson, A. M., & Pham, TT.(2018). Transforming REDD+: Lessons and new directions. CIFOR.
- Aryal, K., Maraseni, T., Rana, E., Subedi, B. P., Laudari, H. K., Ghimire, P. L., ... &Timilsina, R. (2024). Carbon emission reduction initiatives: Lessons from the REDD+ process of the Asia and Pacific region. *Land Use Policy*, 146, 107321.
- Biermann, F. (2007). Good Environmental Governance: A New Approach to Global Environmental Challenges. In *Global Environmental Governance: Perspectives on the International Politics of the Environment* (pp. 85-103). Palgrave Macmillan
- Brodjonegoro, B. (2023). Tantangan kebijakan dan tata kelola pembangunan IKN menuju sustainable dan smart city. Dalam Seri Webinar SAPPK 2023.
<https://sappk.itb.ac.id/>

- Center for International Forestry Research (CIFOR). (2021). Indonesia's forest moratorium: Impacts and next steps <https://www.cifor.org/knowledge/publication/8126>
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sari, G. K., & Muttaqin, M. Z. (2019). Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest policy and economics*, 108, 101939.
- Forest Carbon Partnership Facility. (2021). Indonesia receives first results-based payment for reducing emissions from deforestation. <https://www.forestcarbonpartnership.org/news/indonesia-receives-first-results-based-payment>
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan penerapan sustainable development pada pembangunan ibukota negara nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739-749.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di Indonesia. *Attawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183–203. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attawassuth/article/view/9132>
- Herdiana, D. (2022). Pemindahan ibukota negara: Upaya pemerataan pembangunan ataukah mewujudkan tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Transformatif*, 8(1), 1–30. <https://transformativejournal.ub.ac.id/index.php/journal/article/view/177>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2016). Nationally Determined Contribution: Indonesia's Commitment to Reducing Emissions. Ministry of Environment and Forestry. Retrieved from <http://www.menlhk.go.id>
- Mahendra, A., Setiawan, B., & Astuti, M. (2022). Konflik tata kelola lingkungan dalam pembangunan IKN. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 17(1), 55–66. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/jpwk/article/view/10334>
- Malian, D., Diaz, H. R., & Yvonne, G. N. (2024). Analisis Pengaruh Lingkungan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai Kejahatan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2207- 2211.
- MoEF (Ministry of Environment and Forestry). (2022). REDD+ Implementation Report in East Kalimantan. Government of Indonesia. Retrieved from <https://www.menlhk.go.id>
- Prianggodo, C. A. (2023). Pembangunan Ikn Sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis Dalam Perspektif Sustainable Development). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2898>
- Wijaya, A., et al. (2017). How can Indonesia achieve its climate change mitigation goal? An analysis of potential emissions reductions from energy and forestry. World Resources Institute Working Paper. <https://www.wri.org/research/indonesia-climate-mitigation-goal>